

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia ialah negara dengan kualitas pendidikan yang kalah dengan beberapa negara lainnya, bahkan kalah dengan negara ASEAN. Begitu pun mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berada di peringkat rendah. Tentu perihal ini disebabkan oleh pendidikan Indonesia yang belum berperan optimal.

Pendidikan ialah rangkaian upaya guna memperoleh kemajuan bangsa yang teraktualisasikan secara riil melalui upaya memunculkan ketahanan nasional demi memperoleh cita-cita bangsa. Pendidikan berkualitas tentu bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam mengoptimalkan mutu secara kontinu. Tentu perihal ini berperan krusial, khususnya saat dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2003 perihal usaha sadar dan terencana guna menerapkan suasana pembelajaran pada diri siswa sebagai bentuk pengembangan potensi agar mempunyai kemampuan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang berimbang.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Bab II Pasal 3 (2012: 64), memperjelas bila pendidikan nasional berperan sebagai pengembangan kompetensi dan pembentukan terhadap watak maupun peradaban bangsa demi mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mengembangkan kemampuan siswa demi menjadikan mereka sebagai manusia beriman maupun memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa, sehat, berilmu, berkemuliaan akhlak, serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab maupun demokratis. Ketentuan ini turut memperjelas bila jalur pendidikan meliputi pendidikan formal,

nonformal, maupun informal yang meliputi beragam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ialah tahap pendidikan atas tingkat perkembangan siswa, pencapaian tujuan, dan pengembangan kompetensi. Tingkat pendidikan formal, meliputi pendidikan dasar, menengah, ataupun pendidikan tinggi.

Secara formal pemerintah Indonesia sudah mengusahakan pemerataan pendidikan sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah, serta berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Usaha ini sepertinya cenderung mengarah ke perluasan peluang mendapat pendidikan. Pemerataan pendidikan terlaksana dengan mengusahakan supaya masyarakat disegala lapisan mampu merasakan pendidikan tanpa kenal usia, waktu, dan tempat tinggal (kota/desa).

Bagi keseluruhan warga negara Indonesia, mereka memiliki hak memperoleh pendidikan. Tetapi, selagi masyarakat Indonesia belum bisa mengakses pendidikan, maka tujuan menyelenggarakan wajib belajar yang direncanakan pemerintah belum benar-benar tercapai. Arif Rohman (2009: 245) menuturkan bila permasalahan upaya meratakan pendidikan hadir sebab pada Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi amanat bila keseluruhan warga negara mempunyai hak pendidikan. Atas dasar itulah, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan secara merata bagi semua warga negara Indonesia.

Di Indonesia, angka putus sekolah cukup tinggi dan menjadi permasalahan yang penting. Faktor internal penyebabnya yakni kesediaan anak guna menempuh pendidikan pun menjadi hambatan. Tetapi, yang menjadi masalah utama ialah faktor eksternal, yaitu anggaran dana pendidikan. Status sosial perekonomian masyarakat di Indonesia rata-rata menengah ke bawah. Hal ini

memperlihatkan bila putus sekolah merupakan hambatan utama yang menyebabkan anak-anak sulit menempuh pendidikan lanjutan. Mayoritas orang tua secara terpaksa menghentikan anak mereka untuk melanjutkan pendidikan atas dasar pertimbangan anggaran dana.

Biaya pendidikan kerap menjadi permasalahan penting bagi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Muhammad Saroni (2013: 27) menuturkan bila masyarakat yang kerap menjadi korban, akibat pembiayaan pendidikan yang kerap meningkat ialah masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat ini kerap merelakan diri untuk menyaksikan kondisi pendidikan di Indonesia yang makin hari mengalami kenaikan biaya. Bagi pihak yang mengalami kesulitan finansial, tentu untuk memperoleh pendidikan menjadi sesuatu yang sulit. Pastinya kondisi ini menyebabkan mereka kecewa terhadap situasi maupun kebijakan yang dirancang pemerintah.

Usaha pemerintah guna memberi peluang kepada masyarakat supaya mendapat pelayanan pendidikan, yakni dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini sebagai usaha pemerintah guna melaksanakan pembangunan generasi yang lebih unggul dan memperoleh kelayakan pendidikan. PIP ini pun menjadi program pemerintah yang diterbitkan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan terkait didik yang terpaksa putus sekolah akibat terkendala oleh pendanaan.

Pemerintah Indonesia pada era Presiden Joko Widodo menerbitkan PIP guna menjalankan atau menerapkan segala sesuatu yang tertera di perundang-undangan mengingat sampai sejauh ini tidak semua masyarakat Indonesia

mendapat hak mereka, termasuk pendidikan berkualitas. Ada bermacam faktor yang mengakibatkan masalah terkait pendidikan di Indonesia, termasuk kemiskinan. Banyak masyarakat Indonesia yang terpaksa membuang harapan mereka untuk menempuh pendidikan akibat terkendala biaya. Kendati demikian pemerintah telah merencanakan program sekolah tanpa biaya, tetap saja permasalahan ini tidak selesai. Sekalipun siswa tidak membayar uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan, tetap saja mereka dibuat bingung terkait pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya, termasuk membeli kebutuhan pokok, seragam, buku, dan sebagainya. Atas dasar itulah Presiden Joko Widodo menerbitkan PIP agar bisa membantu mendanai segala kebutuhan peserta didik yang kesulitan pembiayaan.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan untuk sektor pendidikan yang diprioritaskan ke semua anak usia sekolah (6-21 tahun), atau keluarga yang situasi perekonomiannya berada digaris kemiskinan. PIP dilaksanakan atas rencana Kemendikbud dan Kemenag. PIP ialah bagian untuk menyempurnakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) semenjak akhir 2014.

Realisasi penyaluran dana PIP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penyaluran Dana PIP SDN Gogik 01

No	Tahun	Target		Disalurkan		Prosentase
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	
1	2019	122	51.075.000	34	14.300.000	35,72%
2	2020	130	58.500.000	56	25.200.000	23,21%
3	2021	132	59.400.000	52	23.400.000	25,79%
4	2022	128	57.600.000	28	12.600.000	45,71%

Sumber: [https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/jenjang\\_sekolah/032219/Sd Gogik/](https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/jenjang_sekolah/032219/Sd%20Gogik/)

Dari tabel di atas, penyaluran dana PIP SDN Gogik 01 ditemukan masalah. Permasalahan itu, seperti pada tiap tahun bantuan PIP tidak sesuai dengan jumlah peserta didiknya. Misalnya tahun 2019 yang sepatutnya memperoleh bantuan 122 siswa, tercatat hanya 34 peserta didik yang memperoleh bantuan. Jumlah dana yang harusnya diterima sebesar Rp 51.075.000,00 dan siswa penerima dana PIP di sekolah baru Rp 14.300.000,00 padahal permintaan pemohon untuk dana PIP sangat tinggi. Hal ini selalu terulang pada tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang, penulis bermaksud melaksanakan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat)?

2. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat).
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penentu keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat).

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengatasi kendala hal proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai dalam hal proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengatasi kendala hal proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mengenai pendidikan, terutama implementasi PIP diharapkan mampu menambah wawasan bagi warga Kecamatan Ungaran Barat sehingga dapat memahami mengenai pentingnya PIP bagi keluarganya yang kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan serta bisa berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan program indonesia pintar.

### **1.5. Kajian Teori**

#### **1.5.1. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian sebelumnya merupakan cara bagi peneliti untuk menghindari persamaan penelitian serta plagiasi. Kajian terhadap penelitian terdahulu dituangkan kedalam matriks penelitian terdahulu. Adapun tujuan dari kajian tersebut adalah untuk memiliki sifat keterbaharuan dalam yang sedang dilakukan ditemukan. Karena keterbaharuan merupakan syarat sebuah kajian. terlampir tabel kajian sebelumnya:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Yudi Agusman (2019)	untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka.	Metode Penelitian : Kualitatif	<p>Hasil penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal ini didasari oleh fakta dilapangan bahwa tidak semua siswa kurang mampu di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mendapatkan dana PIP. Selain itu, SD Negeri 1 Kolakaasi masih memiliki kendala lain dalam penyaluran PIP yaitu penetapan usulan calon penerima PIP yang kurang tepat sasaran dan adanya aparat sekolah mengenakan biaya administrasi bagi siswa-siswi penerima PIP.</li> <li>- Bahkan ada beberapa wali murid memanfaatkan dana PIP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anaknya.</li> <li>- Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan</li> </ul>



			<p>PIP, dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Donald S. Van Meter dan Van Horn. dalam (Parmadi, 2018) mengemukakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta (6) sikap para pelaksana (disposisi implementor).</p>
<p>Ega Aditya Alfa Riqi (2020)</p>	<p>Menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.</p>	<p>Metode Penelitian : Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Kecamatan Tembalang: Jumlah anak yang tidak bersekolah secara keseluruhan berjumlah 8197 siswa. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan rentang usia 7-12 tahun masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah. Kecamatan Tembalang sendiri memiliki jumlah anak tidak bersekolah usia 7-12 tahun sebanyak 109 siswa, Semarang utara 100 siswa, dan Semarang barat 100 siswa, dan yang terendah adalah Gajahmungkur sebesar 9 siswa.</li> </ul> <p>Indikator Lima Tepat Riant Nugroho dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah</p>

			<p>Dasar di Kecamatan Tembalang</p> <p>a.Ketepatan Kebijakan, b.Ketepatan Pelaksana, c.Ketepatan target d.Ketepatan Lingkungan e.Ketepatan Proses.</p>
3. Riska Anugrah (2018)	<p>1. Implementasi program Indonesia pintar di SD N 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal</p> <p>2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di SD N 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal.</p>	<p>Metode Penelitian :Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian:</p> <p>1. pelaksanaan program ini di SDN 1 Pelita sudah baik hanya saja masih ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program ini seperti program ini masih tidak tepat sasaran, kesadaran orang tua terhadap pemanfaatan dana tersebut masih rendah. Dalam pelaksanaan di SDN 1 Pelita tersebut sudah berjalan dengan cukup baik hanya saja dalam pelaksanaan program tersebut masih kurang di aspek komunikasinya antara orang tua murid dan sekolah dan masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemanfaatan dana PIP.</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di SDN 1 Pelita Tanjung Karang ialah pada saat mau pencairan orang tua cepat untuk mengambil dana tetapi pada saat sekolah meminta bukti dari bank banyak orang tua yang tidak memberikan bukti dari bank kesekolah, sekolah sulit mengetahui pemanfaatan</p>

			<p>dana tersebut karna sekolah hanya pengantar dan dana tersebut langsung ke orang tua yang bersangkutan, adanya kecemburuan dari yang tidak mendapatkan merasa berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak dapat akan tetapi keluarga yang diliat mampu malah anaknya mendapatkan bantuan program Indonesia pintar. Dan faktor pendukung dalam pelaksanaan program Indonesia pintar ialah adanya informasi dari pihak dinas pendidikan kota Bandar Lampung dan sekolah secara online, adanya pemeriksaan rutin dari dinas dan siswa yang mendapatkan program Indonesia pintar menjadi giat dalam belajar karena kebutuhan sekolah terpenuhi.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini mempunyai kesamaan pada fokus, yaitu tentang bantuan siswa miskin dan yang membedakan kajian teori dari penelitian terdahulu bahwa penelitian ini dilakukan di lokus yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

### **1.5.2. Administrasi Publik**

Administrasi publik sebenarnya bukan konsep baru, sebab telah ada sejak sekian tahun yang lalu. Hanya saja, beberapa ahli menggantikan istilah

administrasi publik sebagai administrasi negara. Ada bermacam pakar yang mendefinisikan administrasi publik, sesuai uraian di bawah ini.

Chandler dan Plano, menuturkan bila administrasi publik sebagai tahapan ketika sumber daya dan anggota publik terorganisasi dan terkoordinasi demi merancang, menerapkan, dan mememanajemen keputusan pada kebijakan publik.

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig, menuturkan bila administrasi publik sebagai aktivitas pemerintah selama menjalankan kekuasaan politik.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus menuturkan bila terdapat tiga perihal utama pada administrasi publik, seperti: (1) Penerimaan kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan oleh lembaga perwakilan politik; (2) Usaha perseorangan dan kelompok berkoordinasi demi menjalankan kebijakan pemerintah; (3) Tahap terkait implementasi kebijakan pemerintah, mengarahkan pada kecakapan, dan teknik dengan jumlah banyak, memberi arahan atas usaha sejumlah pihak.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro menjabarkan administrasi publik, seperti:

1. Jalinan kerja sama antar kelompok di wilayah pemerintahan;
2. Terdiri atas 3 bagian pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, maupun keterkaitan di antara mereka;
3. Berperanan krusial untuk merumuskan kebijakan pemerintah sebab sebagai bagian dari proses politik;

4. Terkait dengan bermacam kelompok swasta maupun perseorangan terkait penyajian ke masyarakat.
5. Di beragam definisi administrasi perorangan tidaklah sama.

Nicholas Henry menuturkan bila administrasi publik ialah susunan antara praktik maupun teori yang bermaksud guna mempromosikan pemahaman kepada pemerintah terkait masyarakat yang diperintah, serta mengarahkan kebijakan publik dengan maksud, yakni makin responsif kepada kebutuhan sosial. Administrasi publik berupaya menerapkan praktik manajemen supaya berdasar pada nilai efisiensi, efektivitas, maupun upaya memenuhi keperluan masyarakat.

Berdasar definisi terkait administrasi publik, memperjelas bila administrasi publik ini ialah kerja sama yang sekelompok individu/lembaga lakukan selama menjalankan tugas pemerintahan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan publik secara cepat dan mudah. Kerja sama itu dapat diperjelas ke tingkatan yang pemerintah lakukan guna merespons suatu wacana. Dengan begitu, dapat disebut bila administrasi publik terkait kuat dengan segala sesuatu yang pemerintah lakukan. Administrasi publik kerap terkait dengan penerapan dari kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan itu tentu melalui tahap dan ditentukan pada peraturan agar tujuan yang sudah terencana bisa dicapai. Atas dasar itulah, peraturan yang menunjang guna memperoleh tujuan itu berperan vital sehingga pemerintah perlu merancanginya. Peraturan itu dapat disebut sebagai kebijakan publik. Melalui penuturan itu, memberi simpulan bila administrasi publik berhubungan cukup dekat dengan kebijakan publik.

### **1.5.3. Paradigma Administrasi Negara/Publik**

Paradigma ialah pola pikir yang seorang atau kelompok orang miliki sebab ilmu pengetahuan cenderung memiliki sifat relatif, kendati salah satu syarat ilmu pengetahuan ialah perlu diterima secara umum. Hanya saja, selama periode tertentu tetap terjadi perubahan, begitu pun dengan ilmu eksakta sekalipun. Sebab memiliki keterbatasan kebenaran ilmiah itu bersifat abstrak, maka dalam perkembangan ilmu pengetahuan hadir paradigma ilmu pengetahuan. Thomas Khun (dalam Inu Kencana. 2003: 34) memaparkan bila paradigma adalah perspektif, nilai, prosedur, prinsip dasar, maupun teknik pemecahan suatu masyarakat ilmiah di kurun waktu tertentu.

Robert T Golembiewski dalam buku (Inu Kencana. 2003: 34) memaparkan bila disiplin ilmu diperhatikan melalui lokus maupun fokusnya. Fokus mempermasalahkan suatu kajian dan cara penyelesaian masalah. Lain dengan lokus yang mempermasalahkan lokasi implementasi suatu ilmu pengetahuan.

Dinamika ilmu administrasi publik mengalami perkembangan dan dikenali oleh beberapa paradigma yang merepresentasikan perubahan maupun perbedaan terkait teori, tujuan, ataupun metodologi dan bangunan epistemologi atau nilai yang melatarbelakangi. Paradigma administrasi negara yang berkembang secara khusus dari Nicholas Henry sudah cukup dikenal.

Nicholas Henry (dalam Harbani Pasolong. (2014: 28-30) memaparkan bila paradigma administrasi seperti:

1. **Paradigma pertama, Prinsip administrasi negara (1927-1937)**, lokus administrasi bukan sebagai permasalahan pada paradigma yang mementingkan fokus, seperti prinsip administrasi dipandang bisa berlaku secara umum ke tiap

bentuk organisasi maupun tiap lingkungan sosial budaya. Administrasi mempunyai prinsip yang jelas dan mampu diterapkan di berbagai negara tanpa melihat budaya, visi, maupun misi negara tersebut. Tokoh yang terkenal pada fase paradigma ini salah satunya Mary Parker Follet, Hendri Fayol, F. W Taylor.

2. **Paradigma Kedua, Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926).** Ilmu administrasi negara memiliki batasan terhadap permasalahan organisasi, kepegawaian, maupun rancangan anggaran lembaga dan pemerintah. Permasalahan pemerintahan, politik, maupun kebijakan sebagai pusat ilmu politik. Lokus pada paradigma ini ialah permasalahan letak administrasi ini sepatutnya berada. Selama periode tersebut, terbagi letak antara administrasi negara dengan politik negara. Pihak yang mencetuskan gagasan itu, yakni Leonardo D. White dan Frank J. Goodnow.
3. **Paradigma Ketiga, Administrasi Negara ialah Ilmu Politik (1950-1970).** Di tahap paradigma ini menjadi usaha guna menentukan ulang keterkaitan antara administrasi negara dan ilmu politik. Akibat dari hal ini, yakni kewajiban merancang bidang ini minimal pada keterkaitannya dengan fokus keahlian.
4. **Paradigma Keempat, Administrasi negara ialah ilmu administrasi (1954-1970).** Administrasi negara sudah terjadi peningkatan sebagai ilmu administrasi yang dimulai karena rasa tidak senang bila ilmu administrasi sebagai ilmu kelas dua, di bawah ilmu politik. Di tahapan ini, ilmu administrasi sekadar memberi fokus dan tanpa memberi lokus.

**5. Paradigma Kelima, Administrasi Negara ialah Ilmu administrasi negara (1970).** Selama kurun waktu tersebut, administrasi negara sudah mengalami perkembangan sebagai ilmu administrasi negara, yakni mengarah pada teori organisasi, kebijakan, maupun ilmu ekonomi politik. Selama kurun waktu singkat, administrasi negara sudah memperlihatkan identitasnya sendiri.

#### **1.5.4. Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik sesuai penuturan Thomas Dye (dalam Subarsono. 2005: 2), yaitu segala pilihan pemerintah guna bertindak atau tidak bertindak. Konsep yang di ungkapkan oleh Thomas Dye sangatlah luas karena mencakup tindakan yang tidak dilakukan pemerintah serta tindakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi suatu masalah publik.

James E. Anderson (dalam Subarsono. 2005: 2) mendefinisikan kebijakan publik ialah wewenang atas penentuan badan maupun aparat pemerintahan. Pendapat tersebut lebih menekankan pada peran aktor dari dalam pemerintah (pejabat dan badan pemerintah) di sektor tertentu, semisal bidang pendidikan, perekonomian, pertanian, industri dan lain-lain.

Lingkup dari kebijakan publik memang cukup luas sebab meliputi bermacam bidang pembangunan, misalnya kebijakan publik di sektor pendidikan, pertahanan, maupun transportasi. Selain itu, jika diperhatikan melalui hierarkinya, kebijakan publik bisa memiliki sifat regional atau lokal, meliputi perundang-undangan, peraturan daerah, provinsi, maupun kota/kabupaten. Dalam perumusannya kebijakan publik menjadi ranah yang sangat bercirikan kekuatan guna saling memengaruhi masing-masing pihak.



Carl Friedrich (Dalam Dwiiyanto Indiahono. 2009) mendefinisikan kebijakan publik merupakan tindakan yang terarah ke tujuan atas usulan dari individu, sekelompok individu maupun pemerintah di lingkungan tertentu terkait keberadaan kendala sembari mencari kesempatan guna memperoleh tujuan tertentu.

Melalui pengertian yang sudah tersampaikan, memperjelas bila administrasi publik ialah tindakan pemerintah di berbagai sektor kehidupan manusia yang bertujuan menghilangkan masalah publik. Perihal ini memperjelas jika kebijakan publik ialah langkah bagi pemerintah guna menyelesaikan suatu permasalahan publik dengan cara membuat sebuah kebijakan yang melibatkan aktor dari pemerintah sesuai dengan wilayah kebijakan tersebut.

Setiap disiplin ataupun sub disiplin terdapat cakupan masing-masing. Kebijakan publik ialah unsur disiplin dan bukan sebagai serangkaian yang tunggal, melainkan rangkaian kegiatan yang berupa siklus. Siklus ini membentuk cakupan administrasi publik.

Ripley (dalam Kusumanegara. 2010) menjabarkan kegiatan fungsional maupun produk tahap kebijakan, seperti:

1. Agenda pengaturan

Sebagai suatu tahapan guna menentukan permasalahan sebagai perhatian pemerintah agar dirancang menjadi kebijakan. Pemerintah akan berhadapan dengan bermacam kondisi maupun wacana di sekitarnya.

Atas dasar itulah, pemerintah akan menentukan sebuah wacana untuk dijadikan landasan dalam membuat kebijakan publik. Kegiatan fungsional pada tahap ini seperti:

- Bagaimana permasalahan yang dihadapi kelompok atau individu, termasuk masalah publik atau bukan;
- Masalah didefinisikan;
- Mobilisasi dukungan guna mencantumkan permasalahan tersebut sebagai agenda pemerintah. Perihal ini menjadi persaingan karena daftar tuntutan yang akan dilaksanakan bersifat terbatas, dan dengan jumlah kelompok atau individu memperhatikan sebuah masalah, namun terdapat definisi yang spesifik mengenai masalah yang bisa diangkat pemerintah.

## 2. Formulasi dan legitimasi tujuan maupun program.

Tidak semua permasalahan yang ada di daftar agenda hendak terwujud ke kebijakan maupun program. Beberapa dari permasalahan itu hendak dirancang kembali sebagai sesuatu yang kompleks dan terdapat 4 aktivitas fungsional yaitu:

- Memformulasikan alternatif yang kemudian diratifikasi adalah mengkoleksi, menganalisis, menyebarkan informasi untuk penilaian.
- Pengembangan alternatif.
- Advokasi dari kelompok memberi saran ke bermacam titik pandang maupun alternatif yang berlainan, serta mencari dukungan bagi alternatif yang disukai.

- Akhir dari negosiasi dan kompromi ialah keputusan. Apabila negosiasi dan kompromi gagal maka keputusan tidak akan dibuat. Bentuk hasil akhir dari kegiatan ini adalah statemen kebijakan dan rancangan program guna mencapai tujuan.

### 3. Impelementasi program.

Sesudah formulasi dan legitimasi terlaksana, maka program perlu diselenggarakan. Supaya program berjalan dengan baik, tentu memerlukan sumber daya, hukum perlu diperjelas ke regulasi tertulis dan elaborasi. Karena perbedaan pendapat dalam implementasi akan dapat menimbulkan konflik sehingga penyelesaian konflik diperlukan. Tindakan kebijakan ialah produk dari bermacam kegiatan yang terjadi pada tahapan penerapan.

### 4. Mengevaluasi penerapan

Sesudah aksi kebijakan menyebabkan bermacam dampak, evaluasi pada kinerja atau akibat pun harus terlaksana. Evaluasi merupakan langkah untuk menilai apa pun yang sudah terjadi dan yang digagas. Perihal yang perlu mendapat evaluasi, seperti:

- Dampak penerapan program yang baru terlaksana, evaluasi proses kerja program.
- Dampak dari penerapan program yang telah lama atau telah selesai.

### 5. Keputusan terkait masa depan program dan kebijakan.

Evaluasi kerap menciptakan simpulan yang memicu seseorang untuk mempertimbangkan masa depan program atau kebijakan itu. Pada tahap ini

kembali lagi ke agenda seting apakah kebijakan perlu dilanjutkan atau disingkirkan.

Implementasi merupakan proses inti dalam sebuah proses kebijakan publik, implemetasi merupakan proses kebijakan mencapai tujuannya. Bahkan baik dan buruk sebuah kebijakan dapat dilihat saat pelaksanaan kebijakan tersebut. setelah program selesai dijalankan bisa diketahui apakah kebijakan tersebut berjalan optimal ataukah belum. Penerapan juga dapat menilai kualitas aktor pelaksana maupun menilai aktor lainnya yang berpartisipasi pada kebijakan itu. Oleh karenanya, penerapan berperan sebagai tahapan penting pada proses kebijakan publik. Dengan demikian, peneliti melangsungkan kajian perihal implementasi kebijakan publik terkait Program Indonesia Pintar (PIP) serta mempergunakan teori implementasi.

Administrasi publik dan merumuskan kebijakan publik administrasi publik atau administrasi negara, yaitu aspek dari aktivitas pemerintahan. Administrasi publik ialah unsur dari ilmu pengetahuan yang terkait dengan proses politik, khususnya mengenai rumusan bermacam kebijakan negara. Atas dasar itulah, administrasi publik telah dikenali sejak adanya sistem politik di suatu negara sehingga turut memengaruhi tingkat rumusan kebijakan mengingat administrasi publik berperan guna memperoleh tujuan yang sudah direncanakan (Kasim, 1994: 8).

Proses administrasi ialah proses politik, sesuai penuturan Dimock (1996: 40), yaitu unsur dari tahap politik suatu bangsa. Perihal ini dapat dimengerti sebab berdasar perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik disebut

sebagai ilmu yang diarahkan supaya aktivitas kenegaraan bisa berjalan berdasar pada tujuan (Suradinata, 1993: 33).

Pada konteks politik, administrasi publik berperan untuk merumuskan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (1980: 14) menuturkan bila administrasi publik terdapat peran krusial mengenai rumusan kebijakan negara sehingga menjadi unsur dari proses politik.

Begitu pun dengan administrasi publik yang diasumsikan sebagai bagian yang penting pula dengan peran penerapan kebijakan negara. Hendri (1975: 3) menuturkan bila di bagian terpenting selama abad kedua puluh, birokrasi pemerintah sudah menjelma sebagai perumusan kebijakan negara dan bertugas untuk menentukan arah maupun tujuan negara itu.

Atas dasar itulah, birokrasi pemerintah makin diharuskan mengimplementasikan prinsip efisiensi supaya pemanfaatan sumber daya terlaksana secara maksimal di bidang publik. Tidak hanya itu, turut pula diharuskan untuk memiliki kemampuan administrative agar bisa terwujud pemerintahan yang efisien atau arti lainnya ialah pejabat administrasi pemerintah harus dioptimalkan kembali (Gordon, 1982: 26-27; dalam Henry, 1986: 21-22).

Sesuai penuturan tersebut, memperjelas bila administrasi publik terepresentasikan melalui pengertian dan seseorang yang bertindak berdasar pada fungsi maupun jabatan resmi terkait penerapan aturan undang-undang yang diterbitkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, ataupun peradilan. Pengertian ini menjabarkan bila administrasi publik ikut serta menentukan semua tahap kebijakan publik (Gordon, 1982: 6).

Pemahaman terkait kebijakan publik tersebut memicu beberapa ahli administrasi mempergunakan istilah yang tidak sama. Beberapa ahli menyebutnya dengan kebijakan publik maupun kebijaksanaan publik. Dua istilah ini memiliki disimilaritas karena kebijakan merupakan istilah yang merujuk ke produk yang diterbitkan oleh lembaga publik dengan bentuk seperti aturan undang-undang dan keputusan. Lain dengan kebijaksanaan yang terfokus ke elastisitas kebijakan. Bahwa administrasi publik berperan cukup besar dan lebih banyak berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan, penerapan, maupun mengevaluasi kebijakan (Gordon, 1982: 82).

Ilmu administrasi publik yang berkembang dengan cakupan meliputi analisis dan rumusan kebijakan, penerapan dan mengendalikan penerapan, serta monitoring maupun penilaian hasil penerapan kebijakan itu (Kasim: 1994:12).

Administrasi publik di tingkatan operasional oleh pemerintah mempunyai peran besar sebab kerap berpartisipasi di tingkat penerapan kebijakan, merumuskan kebijakan, maupun pengevaluasian kebijakan. Peran administrasi publik pada proses politik, sesuai penuturan (Islamy, 2001: 10), makin mendominasi, yakni berpartisipasi pada tahap merumuskan kebijakan dan penerapan kebijakan negara. Artinya, administrasi publik bukan sekadar berperan secara instrumental, tetapi terlibat aktif dalam peran politik.

Atas dasar itulah, merumuskan kebijakan negara sebagai sesuatu yang krusial bagi administrasi publik. White (dalam Silalahi, 1992: 17) memaparkan bila administrasi publik meliputi keseluruhan aktivitas guna memperoleh tujuan atau menerapkan kebijakan.

Perspektif serupa pun disampaikan Pfiffner dan Presthus (dalam Silalahi, 1992: 18), menyebut bila administrasi publik sepatutnya bisa terumuskan menjadi media koordinasi dari seseorang dan kelompok yang menjalankan kebijakan negara.

Sesuai penuturan tersebut, bisa diperhatikan perihal bagaimanakah keterkaitan antara kebijakan administrasi publik maupun kebijakan negara, yang secara prinsip sesuai penuturan (Silalahi, 1992: 21) bisa diperhatikan melalui tingkatan berikut:

1. Merumuskan Arah Negara

Tingkatan ini memperlihatkan ke kelembagaan. Lain dengan makna perumusan yang merancang dan menentukan lembaga yang berfungsi selaku perumus kebijakan, yang dijabarkan sesuai tiga poin di bawah.

- a. Berkewenangan dalam penentuan dan penentuan kebijakan (disertai oleh pemerintah);
- b. Berkewenangan menyampaikan keinginan/harapan publik berbentuk hukum; dan
- c. Beracuan secara utuh terhadap *political authority*;

2. Melaksanakan Arah Negara

Sesuai definisi administrasi negara, tingkatan melaksanakan arah negara kerap dikenal sebagai tingkat administrasi. Atas dasar itulah, cukup menjelaskan bila ada keterkaitan antara kebijakan negara dengan administrasi publik dan politik sebab tiap keinginan politik bisa masuk ke kebijakan negara yang ditentukan. Berbeda dengan tingkat penerapan

kebijakan, yakni birokrasi selaku unsur dari administrasi publik, pun bisa mendesak aspirasi mereka dalam menyusun kebijakan negara.

Saat ini, beberapa pakar administrasi publik bukan sekadar menjelaskan administrasi publik sebagai sesuatu kelembagaan, seperti negara, namun sudah bercakupan luas ke dimensi keterkaitan antara lembaga atau lembaga yang berkepentingan publik. Atas dasar itulah, pada konsep demokrasi modern, sesuai perspektif Islamy (2001: 10), menyebut bila kebijakan negara bukan sekadar memuat gagasan atau asumsi dari para pejabat, melainkan pendapat publik yang memiliki porsi serupa untuk dicantumkan dan terepresentasikan melalui kebijakan negara. Sebab itu, kebijakan negara perlu terfokus pada kepentingan publik.

Berdasar konseptual, kebijakan publik tersebut dikaji oleh dua disiplin ilmu, seperti ilmu politik maupun administrasi publik. Setiap disiplin ilmu itu mempunyai perspektif berlainan atas kebijakan publik. Perihal ini disebabkan setiap disiplin ilmu mempunyai lokus dan fokus berlainan. Lokus ilmu administrasi negara, yaitu organisasi maupun manajemen. Lalu, fokus ilmu administrasi negara ialah efektivitas dan efisiensi.

Sesuai konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik dirancang oleh pemerintah selaku peran dinamis dari negara, yang diperlihatkan untuk melahirkan efektivitas. Selama melaksanakan tugas pemerintahan maupun kenegaraan, ilmu administrasi negara terbagi atas organisasi, manajemen, personalia, material, keuangan, humas, komunikasi, maupun tata usaha.

Kebijakan publik ialah peran dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur organisasi pada sudut pandang ini ialah negara, sedangkan unsur manajemen ialah



pemerintahan. Negara diasumsikan sebagai media atau organisasi dalam artian statis. Unsur ini membutuhkan mesin yang mampu menggerakkan agar bisa mendinamisasikan. Unsur dinamis tersebut atau di dalam sistem negara disebut sebagai pemerintahan. Pada sudut pandang ini, pertemuan antara unsur negara dan pemerintahan mampu menciptakan aturan dan hukum yang kerap dikenal sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik hendak terlaksana atas prakarsa administrasi negara yang birokrasi pemerintah jalankan. Kebijakan publik di suatu negara modern bertujuan guna memberi layanan publik sebagai beragam hal yang dapat dilaksanakan negara demi mengoptimalkan maupun menjaga mutu hidup masyarakat luas. Penyeimbangan fungsi negara yang mempunyai keharusan memfasilitasi layanan publik atas dasar hak demi menarik retribusi dan pajak; serta di lain sisi turut sebagai penyeimbang bermacam kelompok di dalam masyarakat dengan beragam kepentingan.

#### **1.5.5. Implementasi Kebijakan**

Definisi implementasi, sesuai Kamus Webster dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, yaitu berakar dari bahasa Inggris: *to implement*. Webster dalam Wahab (2005: 64) menjelaskan bila implementasi bermaksud guna memunculkan akibat yang bisa berwujud perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan, maupun kebijakan hasil rancangan lembaga pemerintah untuk kehidupan kenegaraan. Implementasi kebijakan bukan sekadar terkait dengan sistematika

dalam menjabarkan keputusan politik ke tata cara rutin melalui saluran demokrasi, hanya saja implementasi terkait dengan permasalahan, keputusan, dan pihak yang mendapat kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990: 59). Atas dasar itulah, cukup wajar bila implementasi kebijakan sebagai unsur penting dari semua proses kebijakan karena memperlihatkan bila terdapat aktivitas yang berkaitan kuat antara merumuskan kebijakan dengan penerapan kebijakan.

Jika dalam tahap penerapan berlainan dengan syarat, tentu kebijakan yang awalnya baik berpotensi besar mengalami perubahan menjadi buruk, begitupun sebaliknya. (Wahab, 1990: 51) menambahkan bila penerapan kebijakan sebagai unsur terpenting, bahkan lebih penting dibanding perumusan kebijakan. Kebijakan sekadar rencana saja bila disimpan di dalam arsip bila tidak bisa mengimplementasikan.

Patton dan Sawicki dalam (Tangkilisan, 2003: 9) menuturkan bila penerapan terkait bermacam aktivitas yang terarah guna mewujudkan program: pada kedudukan ini eksekutif menentukan metode dalam mengorganisasi maupun mengaplikasikan kebijakan yang sudah direncanakan.

Ripley dan Franklin turut menjabarkan bila penerapan/implementasi sebagai segala sesuatu yang terjadi sesudah aturan perundang-undangan ditentukan, yang memberi otoritas terhadap kebijakan, program, keuntungan, atau keluaran yang riil. Penerapan ini meliputi tindakan beberapa aktor, terutama birokrat yang bermaksud guna merancang program agar tetap terlaksana.

Van Meter dan Van Horn dalam (Solichin 2007: 146) melakukan pembatasan atas penerapan kebijakan ialah tindakan yang seseorang atau

sekelompok orang lakukan, baik pemerintah atau swasta, terarahkan demi memperoleh tujuan yang sudah ditentukan pada kebijakan sebelumnya. Tindakan ini meliputi upaya melakukan perubahan terhadap keputusan menjadi tindakan operasional dalam periode tertentu atau guna melanjutkan upaya demi memperoleh perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Melalui bermacam penuturan tersebut, memberi simpulan jika penerapan kebijakan sebagai tahap penting yang perlu dilaksanakan sebagai kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Sebab, tahapan ini bisa menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan kebijakan. Di tiap perumusan kebijakan akan mengaitkan program atau aktivitas yang kerap disertai oleh tindakan pelaksanaan. Sebab, seberapa baik sekalipun kebijakan jika terlaksana tanpa ada penerapan, tentu tidak cukup signifikan hasil yang didapat.

Charles O. Jones (I nyoman,2005: 15) menuturkan jika tahap kebijakan publik seperti anggapan, agreraris, penggambaran, organisasi, menyusun agenda, legitimasi, menganggarkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan menyesuaikan. Kegiatan birokrasi pemerintahan ditekankan ke proses yang lebih dari tahap penerapan dengan menjabarkan kebijakan sebagai program, proyek, maupun aktivitas. Atas dasar itulah, program ialah unsur pertama yang perlu tersedia agar bisa mencapai aktivitas pelaksanaan.

Program akan mendukung implementasi sebab terdapat 5 aspek, seperti:

1. Terdapat tujuan yang hendak diperoleh.
2. Terdapat kebijakan yang perlu ditentukan demi memperoleh tujuan itu.
3. Terdapat peraturan yang perlu dijadikan tolok ukur.

4. Terdapat estimasi pendanaan yang diperlukan.
5. Terdapat strategi dalam penerapan.

Mazmania dan Sabatier dalam (Fadillah Putra, 2003: 84) memaparkan bila implementasi sebagai upaya pengkajian terhadap permasalahan kebijakan, tepatnya sebagai prosedur memahami apa pun yang sudah terjadi setelah pemberlakuan/perumusan program, seperti kejadian maupun aktivitas yang terjadi sesudah mengesahkan kebijakan, termasuk terkait usaha administrasi atau yang menyebabkan akibat riil pada masyarakat. Sesuai uraian tersebut, memberi simpulan bila tahap administrative terkait dengan jaringan perekonomian, politik, dan sosial yang mampu memengaruhi perilaku dari segala pihak yang berpartisipasi, serta memengaruhi tujuan kebijakan secara positif atau negatif.

#### **a. Definisi Program**

Sebenarnya, definisi program ialah penjelasan suatu rencana. Program ialah unsur dari rencana dan kerap dipahami bila program sebagai rancangan dasar dari implementasi aktivitas. Westra (1989: 236) memaparkan bila program sebagai rumusan berisikan rencana kerja yang hendak dilakukan, termasuk prosedur maupun ketentuan dalam melaksanakannya.

Siagian (dalam Westra 1989: 124) memaparkan bila menyusun program sebagai penjelasan rencana yang sudah ditentukan agar program kerja mempunyai kriteria operasional.

Agar makin memahami program, maka uraian di bawah ini akan menjabarkan kriterianya, seperti:

1. Perumusan tujuan harus rinci.

2. Menentukan media atau instrumen yang tepat demi memperoleh tujuan itu.
3. Kerangka kebijakan harus stabil atau proyek yang berkaitan satu sama lain demi memperoleh tujuan program secara efektif maupun efisien.
4. Mengestimasi anggaran dan keuntungan yang didapat dari program itu.
5. Keterkaitan dengan aktivitas lainnya dalam upaya pembangunan maupun program pembangunan, mengingat suatu program terkait satu sama lain.
6. Berbagai usaha di bidang manajemen, seperti menyediakan tenaga dan pendanaan bermaksud guna menjalankan program itu (Bintoro 1987:181).

Jones (1996: 295) menuturkan pendapatnya bila program merupakan unsur awal yang perlu tersedia untuk menciptakan suatu aktivitas. Jones pun turut memperjelas bila di dalam program dirancang bermacam aspek, seperti:

1. Mencapai tujuan aktivitas.
2. Aktivitas yang dipilih untuk memperoleh tujuan.
3. Peraturan yang menjadi pegangan dan ketentuan yang perlu dilalui.
4. Memperkirakan dana yang diperlukan.
5. Strategi dalam melaksanakan.

Dengan program tersebut, tentu bermacam bentuk rencana bisa terorganisasi maupun mudah dilaksanakan.

Korten (dalam Jones 1996: 232) menuturkan bila program ialah sekumpulan proyek yang terkait sudah terancang guna menjalankan aktivitas yang terintegrasi dan berkesinambungan demi memperoleh target kebijakan secara menyeluruh. Atas dasar itulah, peneliti memberi simpulan bila rancangan tindakan yang berlandaskan ke model teoretis yang jelas, yaitu sebelum menetapkan

permasalahan sosial yang hendak diatasi dan mengintervensi terlebih dahulu, berarti perlu terdapat gagasan rinci terkait cara maupun alasan permasalahan tersebut terjadi, serta tindakan yang dijadikan penyelesaian. Dengan begitu, penentuan suatu program perlu direncanakan secara jelas agar berdasar pada kebutuhan dan memperoleh tujuan melalui keterlibatan dari pelaksana program.

### **b. Konsep Implementasi Program**

Sebagai tahap yang krusial saat membicarakan implementasi program yang sifatnya sosial maupun di dalam dunia pendidikan. Penerapan program sebagai prosedur untuk melaksanakan aktivitas demi memperoleh tujuan melalui program tersebut. Jones (dalam Arif Rohman, 2009: 101-102) menuturkan bila penerapan program sebagai unsur di suatu kebijakan serta sebagai usaha yang berkewenangan guna memperoleh tujuan.

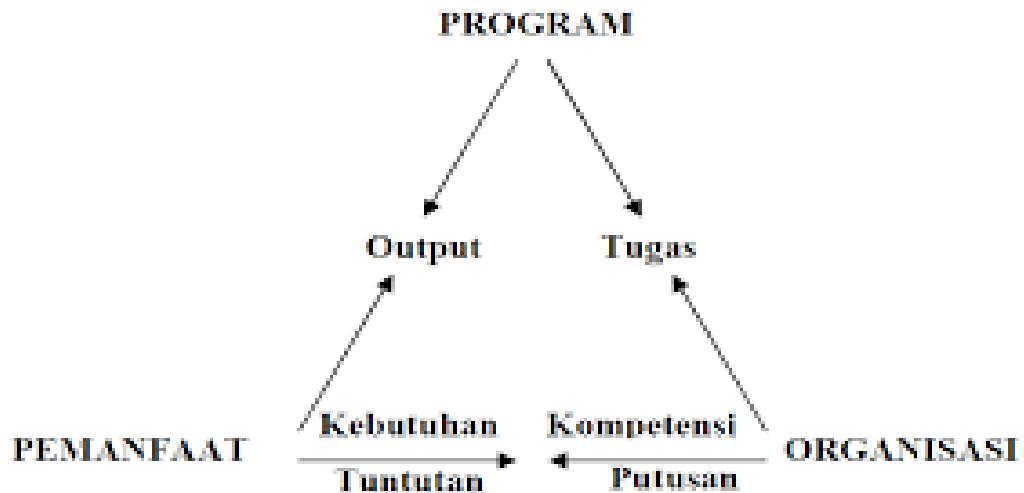
Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) menuturkan bila terdapat tiga kegiatan utama untuk menjalankan program, seperti:

1. Mengorganisasi. Struktur organisasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian program agar pelaksana bisa dibentuk melalui sumber daya manusia yang berkemampuan dan bermutu.
2. Menginterpretasikan. Pelaksana perlu bisa mengoperasikan program berdasar pada petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Aplikasi. Harus ada pembuatan ketentuan kerja yang jelas supaya program kerja bisa terlaksana berdasar pada jadwal aktivitas sehingga tidak bertabrakan dengan program lain.

Model penerapan program, salah satunya yang disampaikan David C. Korten (dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000: 12). Model ini mempergunakan pendekatan tahap belajar mengajar atau disebut sebagai model relevansi implementasi program yang diperjelas seperti gambar di bawah:

Gambar 1.1

Model Relevansi Implementasi Program



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten menjelaskan bila model ini menitikberatkan ke-3 unsur pada penerapan program, yakni: program tersebut, penerapan, maupun kelompok target. Korten juga menjelaskan bila program akan terlaksana secara optimal bila ada relevansi dari ketiga unsur penerapan program, seperti (1) Relevansi antara program dengan pemanfaatannya, yakni relevansi program dengan yang diperlukan kelompok target. (2) Relevansi antara program dengan organisasi pelaksana, ialah relevansi tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kompetensi organisasi pelaksana. (3) Relevansi antara kelompok pemanfaat

dengan organisasi, yakni relevansi persyaratan atas penetapan organisasi demi mendapat output program berdasar pada segala sesuatu yang kelompok target program lakukan.

Simpulan yang didapat, program ialah pemahaman dari kebijakan pemerintah memuat sekumpulan arahan yang dirancang untuk melakukan perbaikan atas masalah yang terjadi. Sudah sepatutnya program tersedia dalam menerapkan kebijakan supaya bisa terlaksana secara terstruktur dan berdasar pada tujuan program itu.

Selama melaksanakan implementasi ada beragam model yang bisa digunakan, seperti model penerapan kebijakan sesuai penjelasan Merilee S. Grindle. Model ini disebut sebagai *Implementation as A Political and Administrative Process*. Grindle juga menuturkan bila ada dua variabel yang memengaruhi penerapan kebijakan publik. Kesuksesan penerapan kebijakan publik bisa terukur melalui proses dalam mencapai hasil akhir, yakni pencapaian tujuan yang hendak diraih. Perihal ini disampaikan pula oleh Grindle, bila pengukuran kesuksesan penerapan kebijakan itu bisa diperhatikan melalui:

1. Memperhatikan proses dengan menanyakan apakah implementasi kebijakan berdasar pada ketentuan yang mengarah ke aksi kebijakan.
2. Memastikan tujuan kebijakan benar-benar tercapai ataukah tidak. Dimensi ini terukur melalui:
  - a. *Impact* yang dirasakan masyarakat secara perseorangan maupun kelompok.
  - b. Derajat perubahan dan penerimaan kelompok target.



Kesuksesan suatu penerapan kebijakan publik, sesuai penuturan Grindle, cenderung ditetapkan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan tersebut, meliputi:

### 1. *Content of Policy*

Kepentingan yang memengaruhi terkait bermacam kepentingan yang memengaruhi penerapan kebijakan. Parameter ini beragumen bila kebijakan dalam pelaksanaan tentu mengikutsertakan bermacam kepentingan, dan sejauh mana kepentingan itu memengaruhi implementasi. Faktor ini yang hendak diketahui secara rinci.

#### a) Tipe Manfaat

Berusaha guna menjelaskan bila di suatu kebijakan perlu ada bermacam manfaat yang berdampak positif atas penerapan kebijakan yang hendak dilaksanakan.

#### b) Tingkat Perubahan yang Hendak Diperoleh

Masing-masing kebijakan terdapat sasaran yang hendak diperoleh. *Content of policy* yang hendak diperjelas pada bagian ini ialah besar kecilnya perubahan yang akan diperoleh dari penerapan kebijakan perlu berskala yang jelas.

#### c) Letak Penentuan Keputusan

Penentuan keputusan di suatu kebijakan berperan krusial dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, bagian ini perlu diperjelas letak penentuan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diterapkan.

#### d) Pelaksana Program

Selama melaksanakan wewenang harus ditunjang oleh pelaksana kebijakan berkemampuan dan terpercaya untuk kesuksesan kebijakan.

e) Sumber Daya yang Dipergunakan

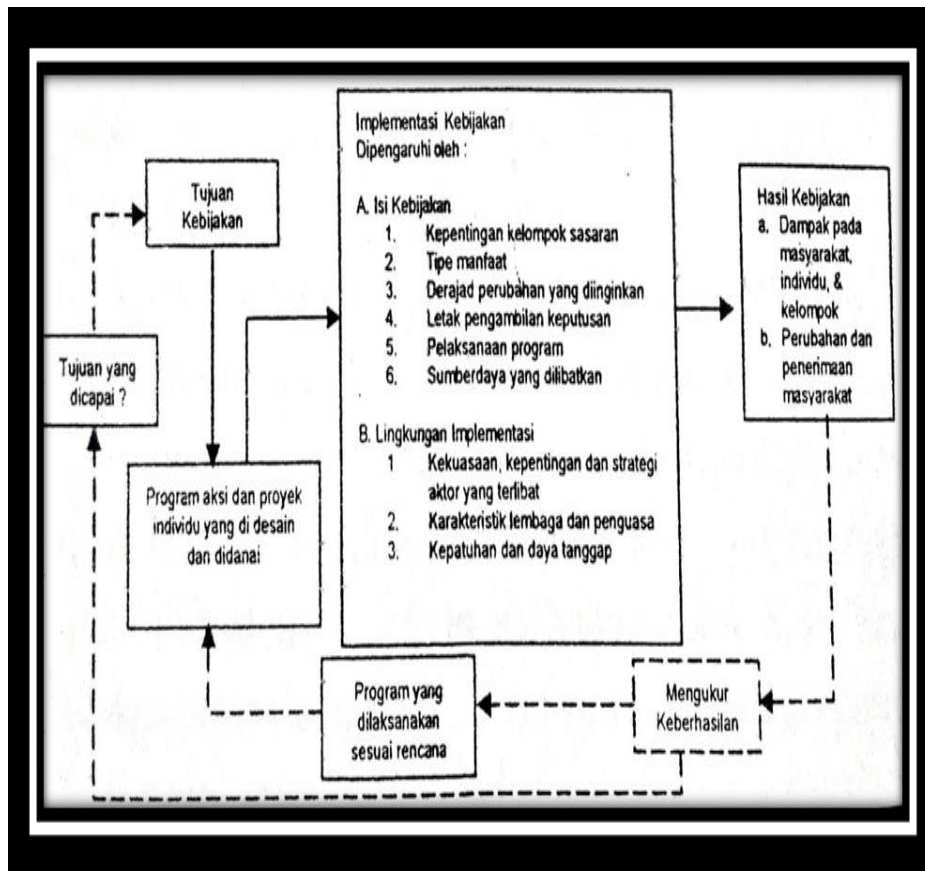
Implementasi kebijakan pun perlu ditunjang oleh sumber daya yang mencukupi supaya pelaksanaan bisa berjalan optimal.

2. *Context of Policy*

- a. Kekuasaan, kepentingan, maupun strategi dari aktor yang terlibat. Di suatu kebijakan harus melakukan pertimbangan atas kekuasaan ataupun kekuatan, kepentingan, maupun penggunaan strategi demi melancarkan penerapan kebijakan.
- b. Kriteria lembaga dan rezim yang berkuasa. Cakupan kebijakan itu terlaksana atas dasar dampak dari keberhasilan. Dengan begitu, bagian ini hendak memperjelas kriteria dari suatu lembaga yang hendak memengaruhi kebijakan
- c. Tingkat ketaatan maupun kehadiran reaksi dari pelaksana. Perihal lain yang dirasa krusial pada tahap penerapan kebijakan ialah ketaatan dan respons dari pelaksana. Dengan begitu, akan diperjelas pada poin ini berupa seberapa jauh ketaatan dan respons pelaksana selama merespons kebijakan.

Gambar 1.2

Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle



Sumber: Merilee S. Grindle (1980) (dalam Agustino, 2014: 155)

Secara umum, tanpa ada model penerapan kebijakan yang dianggap buruk atau baik sebab masing-masing masalah yang diangkat dan diselesaikan dalam sebuah kebijakan yang sudah dirancang haruslah berdasar pada model penerapan yang tepat. Aspek penting dari model kebijakan ialah perihal implementasinya, yaitu bagaimana kebijakan tersebut dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan skenario pembuatan kebijakan. Kajian ini mempergunakan model implementasi kebijakan atas penuturan Merille S. Grindle.

Landasan kebijakan Program Indonesia Pintar berdasar pada Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 sebagai upaya untuk menyempurnakan program terdahulu, yakni Bantuan Siswa Miskin(BSM). Atas dasar itulah, kebijakan PIP

tersebut hendaknya dapat terlaksana dengan optimal. Dengan begitu, harus dilaksanakan kajian lebih lanjut terkait implementasinya mempergunakan model penerapan kebijakan berdasar pada Merille S. Grindle. Kaitannya dengan masyarakat Indonesia, diketahui bila di Indonesia mutu pendidikannya masih rendah. Kajian ini mengulas penerapan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (studi kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat).

Kajian ini mengulas perihal implementasi Program Indonesia Pintar(PIP) khususnya mengenai proses pendistribusian dana program PIP di Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang, terutama di SDN Gogik 01 yaitu sebagai berikut:

1. Mengorganisasi
  - a. Koordinator yang menangani PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
  - b. Target PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
  - c. Penerima bantuan PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
2. Interpretasi
  - a. Mekanisme pendataan dan verifikasi data PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
3. Aplikasi
  - a. Sistematisa menyalurkan dana PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
4. Faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat .

#### **1.5.6. Program Indonesia Pintar (PIP)**

PIP ialah bantuan yang direncanakan pemerintah untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin agar bisa memangkas angka anak putus sekolah. Pada Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 08/D/PP/2016 dan 04/C/PM/2016 tertanggal 30 Mei 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016 sudah diperjelas, seperti definisi, pengorganisasian, mekanisme pelaksanaan, target, nominal anggaran, penggunaan dana, sistematika penentuan dan pembagian PIP.

### **1. Pengorganisasian PIP**

PIP sesuai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yaitu memberi bantuan tunai pendidikan untuk semua anak usia sekolah (enam hingga dua puluh satu tahun) dengan ketentuan dari keluarga pemilik Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau sesuai kriteria yang sudah ditentukan nya. Program PIP ialah upaya menyempurnakan program bantuan siswa miskin yang sudah diterapkan beberapa tahun sebelumnya.

Sesuai Permendikbud No. 19 Tahun 2016 perihal Program Indonesia Pintar (PIP), menyebut bila PIP ialah bantuan uang tunai yang pemerintah berikan bagi siswa dengan orang tua yang tidak atau kurang mampu mendanai kebutuhan pendidikan, sebagai keberlanjutan dan perluasan target dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Siswa ialah anggota masyarakat yang berupaya melakukan pengembangan terhadap potensi diri memanfaatkan aktivitas belajar mengajar yang terdapat di jenjang maupun jenis pendidikan tertentu. Program PIP ini diprioritaskan ke siswa yang berasal dari keluarga pemilik

program perlindungan sosial, program keluarga sejahtera sebagai identitas untuk memperoleh kebermanfaatan dari PIP ini.

PIP diselenggarakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan. Kemendikbud memfasilitasi PIP berlandaskan ke Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendanaan dalam mencetak PIP menjadi beban bagi anggaran direktorat jenderal terkait berdasar pada kuota nasional. Pemberian PIP atau bantuan pendidikan lain untuk menunjang program wajib belajar bermaksud meringankan beban biaya bagi orang tua dengan status perekonomian menengah ke bawah. Bantuan ini setidaknya bisa mengoptimalkan keterlibatan peserta didik dalam menempuh pendidikan dan mengantisipasi siswa putus sekolah.

Pemerintah memberi bantuan pendidikan melalui PIP untuk anak miskin yang rentang putus sekolah supaya bisa tetap memenuhi segala kebutuhan pendidikan di luar biaya operasional sekolah, misal pembelian alat atau segala kebutuhan lain terkait pendidikan/sekolah.

## **2. Mekanisme dalam Melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Implementasi PIP ini dijalankan oleh beberapa pihak, seperti sekolah, dinas kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, maupun tenaga penyaluran.

### **a) Sistematika Pengusulan**

Sistematika ini peserta didik selaku calon penerima PIP sesuai arahan teknis Kemendikbud, yaitu peserta didik dari keluarga pemilik

KPS/KKS/PIP untuk sekolah formal, yang mengentri data peserta didik calon penerima PIP ke aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data itu berperan sebagai data usulan peserta didik calon pihak yang menerima bantuan dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten atau kota menyampaikan usulan calon penerima dari sekolah yang disepakati sebagai usulan ke direktorat teknis. Peserta didik yang tidak mempunyai KPS/KKS/PIP dari keluarga miskin atau rawan miskin, maka bisa mengusulkan sesudah semua peserta didik yang mempunyai KPS/KKS/PIP sudah ditentukan selaku penerima PIP.

Sekolah melakukan penyeleksian dan penyusunan daftar peserta didik yang tidak mempunyai KPS/KKS/PIP selaku calon penerima dana PIP yang diprioritaskan berdasar pada: 1). Peserta didik berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH); 2). Peserta didik berstatus yatim atau piatu yang berasal dari panti sosial/asuhan; 3). Peserta didik terdampak oleh bencana; 4). Anak berusia enam hingga dua puluh satu tahun yang tidak bersekolah agar bersedia sekolah kembali; 5). Peserta didik berasal dari keluarga miskin atau yang rawan putus sekolah; 6). Peserta didik atau anak atas pertimbangan khusus, peserta didik dari orang tua yang di-PHK, di wilayah rawan konflik, keluarga terpidana, maupun orang tua di lapas. Sesudah sekolah melakukan seleksi terhadap anak berdasar skala prioritas, lalu menyampaikan usulan sebagai penerima PIP melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang terdapat di laman dinas

pendidikan kabupaten/kota. Berikutnya, dinas pendidikan kabupaten/kota menyepakati pengajuan dan meneruskan ke direktorat teknis, usulan calon penerima PIP.

Pemangku kepentingan dapat mengusulkan peserta didik ke direktorat teknis berdasar prioritas target dan syarat yang sudah ditentukan untuk direktorat teknis, berikutnya dilaksanakan verifikasi data usulan atas Data Pokok Pendidikan(DAPODIK).

b) Sistematika dalam Menyalurkan PIP

Penyaluran PIP dilaksanakan oleh lembaga penyalur berdasar daftar penerima dari direktorat teknis yang termuat di Surat Keterangan melalui Tabunganku maupun *virtual account*. Direktorat teknis melakukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) dari surat perintah membayar (SPM) ke KKPN agar dapat menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdasar SK direktorat jendral(DIRJEN).

Kemudian, KPPN mengirimkan dana berdasar pada SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis memberikan surat perintah pemindah buku ke lembaga penyalur agar bisa mengirimkan dana dari rekening penyalur ke rekening peserta didik penerima PIP. Direktorat teknis menyampaikan informasi daftar peserta didik penerima ke pendidikan kabupaten/kota dengan mencantumkan pula surat keterangan penerima. Penerima Program Indonesia Pintar(PIP) ini bisa mencairkan dananya di lembaga penyalur.

c) Sistematika dalam Mengambil Dana PIP



Pencairan dana PIP dilaksanakan oleh penerima dengan melampirkan surat keterangan kepala sekolah, salinan rapor yang memuat data diri maupun KTP siswa. Bila penerima belum mempunyai kartu tanda penduduk, maka dalam mengambil dana itu harus didampingi oleh orang tua dengan memperlihatkan KTP orang tua. Penerima akan membubuhkan tanda tangan ke lembar bukti penerima dana yang sudah lembaga penyalur sediakan. Penerima yang mempergunakan *virtual account* atau di wilayah terpencil, maka bisa mengambil secara kolektif dengan menguasai ke kepala sekolah atau bendahara sekolah.

#### **1.6. Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), adapun fenomena penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Pengorganisasian

- a. Koordinator yang menangani Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
- b. Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
- c. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.

##### 2. Interpretasi

- a. Mekanisme pendataan dan verifikasi data Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
3. Aplikasi
    - a. Mekanisme Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat.
4. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat).
    - a. Content of Policy (Lingkungan Kebijakan)
      1. Tipe Manfaat
      2. Tingkat perubahan yang ingin dicapai
      3. Letak penentuan keputusan
      4. Pelaksanaan program
    - b. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)
      - a. Tingkat kepatuhan dan kehadiran respons dari pelaksana

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Danzin dan Lincoln (dalam Moeleong, 2007) memaparkan bila penelitian kualitatif sebagai kajian yang mempergunakan latar ilmiah, yang bermaksud guna menjabarkan peristiwa yang terjadi dan terlaksana dengan mengikutsertakan bermacam prosedur. Dalam penelitian kualitatif, prosedur yang kerap dimanfaatkan, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

### **1.7.2. Fokus dan Lokus**

Fokus pada penelitian ini ialah penerapan PIP di sekolah dasar negeri di Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Penelitian ini juga mencoba mendeskripsikan faktor penentu keberhasilan dari proses implementasi PIP di sekolah dasar negeri di Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

Lokus dalam penelitian ialah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang sebagai pihak yang menangani Program Indonesia Pintar (PIP) dan peristiwa penting pendidikan di wilayah Kabupaten Semarang. Program Indonesia Pintar (PIP) masih mengalami beberapa kekurangan di beberapa indikator salah satunya adalah bantuan siswa miskin. Kekurangan tersebut perlu diselesaikan agar terwujudnya pelaksanaan pelayanan pemerintah pada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Sebagai subyek penelitian nya adalah: “Informan/partisipan” yang dianggap sebagai seseorang yang hendak memberi pengetahuan atau informasi mengenai permasalahan yang dikaji. Penentuan partisipan terlaksana dengan cara *purposive*, yakni partisipan yang terpilih berlandaskan maksud maupun pertimbangan tertentu agar bisa mengetahui secara tepat terkait permasalahan yang berkaitan dengan kajian.

Terlampir sebagai informan/partisipan pada kajian ini yaitu:

1. Kepala SDN Gogik 01
2. Staf SDN Gogik 01
3. Orang tua/wali murid siswa SDN Gogik 01

4. Siswa SDN Gogik 01

#### **1.7.4. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif yakni peneliti sendiri. Berdasar penuturan Sugiyono (2009: 222), peneliti pada penelitian kualitatif ditempatkan sebagai *human instrument* yang memiliki peranan untuk menentukan fokus kajian, pemilihan partisipan, mengumpulkan data, penilaian mutu data, mengkaji data, menjabarkan data, atau merancang simpulan atas hasil temuan.

#### **1.7.5. Jenis Data**

Kajian ini mempergunakan prosedur data kualitatif sehingga jenis data pada kajian ini, seperti tulisan/teks, kata-kata tertulis, tindakan, dan kejadian di dalam kehidupan sosial. Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data utama pada kajian kualitatif ialah :

##### **1. Teks/tulisan**

Bisa berupa angka yang bernilai nominal atau serangkaian huruf yang bisa menjabarkan kondisi yang tengah terjadi.

##### **2. Kata-kata tertulis**

Ialah rangkaian kalimat yang tersusun dan bisa sebagai wakil atau mampu menjabarkan kondisi yang tengah dialami.

##### **3. Tindakan dan kejadian dalam kondisi sosial**

Data yang didapat pada kajian berupa kondisi tempat pelaksanaan kajian.

#### **1.7.6. Sumber Data**

a. Data primer

Merupakan data yang didapat secara langsung melalui sumber utama memanfaatkan metode wawancara secara langsung ke partisipan. Sumber data pada kajian ini *purposive sampling*.

b. Data sekunder

Merupakan data yang didapat melalui studi pustaka atau dokumen informasi terkait permasalahan yang hendak dikaji dari tinjauan pustaka, dokumen resmi, atau kajian terdahulu.

### **1.7.7. Teknik Mengumpulkan Data**

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan untuk tujuan tertentu. Percakapan ini dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang bertanya dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.

Pada penelitian kualitatif kerap kali mempergunakan teknik wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data/informasi. Menurut Sanapiah Faisal (1990) terdapat dua alasan penggunaan teknik wawancara seperti wawancara peneliti bukan sekadar menggali pengalaman dan pengetahuan yang subjek alami, namun segala sesuatu yang tersembunyi pada diri subjek; segala sesuatu yang ditanyakan ke informan/partisipan meliputi segala sesuatu yang lintas waktu terkait masa silam, saat ini, atau masa depan.

b. Observasi

Sutrisni Hadi ( dalam Sugiyono, 2006) memaparkan bila observasi ialah tahap yang kompleks, suatu yang tersesusun dari bermacam tahap biologi maupun psikologi. Dua diantaranya, seperti mengamati dan mengingat. Proses observasi dipergunakan jika peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta jika informan/partisipan yang diamati tidak terlalu besar.

c. Dokumen

Dokumen sebagai bahan tambahan yang diperoleh melalui sumber tertulis dan bisa terbagi menjadi sumber buku maupun majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, atau dokumen resmi.

Berdasar penjelasan tersebut, maka dalam kajian ini peneliti hendak mempergunakan teknik mengumpulkan data dengan menyusun teknik observasi/pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi selama melaksanakan studi lapangan.

### **1.7.8. Analisis Data**

Analisis data ialah tahap penyederhanaan data meliputi catatan lapangan/hasil observasi/pengamatan, hasil wawancara, dan dokumentasi; guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, data kemudian dikaji secara deskriptif kualitatif melalui pendeskripsian atau penggambaran data yang didapat melalui kajian di lapangan ke bentuk uraian secara terstruktur agar bisa disimpulkan untuk pembahasan di bab berikutnya.

Sugiyono (2007: 336) menuturkan bila penelitian kualitatif sudah melaksanakan analisis data sebelum terjun ke lapangan. Analisis terlaksana ke data hasil studi pendahuluan maupun data sekunder, yang hendak dipergunakan untuk memastikan fokus kajian. Tetapi, fokus kajian ini sifatnya masih sementara.

Terdapat lima jenis teknik analisa data yang digunakan pada kajian data kualitatif, yakni:

1. Analisis domain
2. Analisis taksonomi
3. Analisis kompenional
4. Analisis tema kultural
5. Analisis komparasi konstan

Analisis komparasi konstandilakukan dengan mengumpulkan data dari kajian kualitatif dengan jenis deskriptif terlaksana sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama di lapangan, maupun sesudah dari lapangan. Teknik analisis pada kajian ini ialah analisis taksonomi. Analisis sudah dimulai semenjak perumusan dan penjelasan permasalahan, sebelum turun ke lapangan, serta terlaksana hingga penulisan hasil kajian. Tiap data yang diperoleh berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Data dari bermacam sumber yang didapat dari beragam media informasi.

Analisis data kualitatif berlandaskan observasi, wawancara, dokumentasi, maupun artefak. Aktivitas mengumpulkan data terlaksana di lokasi yang dekat. Data jenis tersebut kerap kali tidak mudah diakses peneliti agar bisa diteliti, tetapi tetap membutuhkan bermacam pengolahan. Catatan lapangan harus diluaskan

kembali dan diketik, rekaman suara pun perlu dievaluasi, serta fokus harus terdokumentasikan.

Teknik analisis data sesuai penuturan Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) setidaknya terdapat tiga alur kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu:

a) Kondensasi Data

Mengarah ke pemilihan, penyederhanaan, maupun perubahan data yang mendekat ke semua bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, atau materi empiris lain.

b) Menyajikan Data

Sebagai proses mengorganisasikan, penyatuan dari informasi yang berpotensi menyimpulkan. Penyajian data dapat membantu pemahaman terhadap sesuatu yang terjadi dan bertindak sesuatu untuk masa mendatang, termasuk mengkaji secara rinci atau penentuan tindakan. Kerap kali menyajikan data dituangkan dalam bentuk seperti grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya.

c) Penarikan Kesimpulan

Simpulan bisa mengalami perubahan bila didapati fakta lain yang kuat guna mengumpulkan data selanjutnya. Kesimpulan *final* belum muncul sebelum pengumpulan data berakhir. Untuk menguatkan kesimpulan yang sudah dibuat, proses verifikasi sangat penting; karena setiap penarikan kesimpulan harus disertai proses verifikasi dan yang menjadi dasar kebenaran dalam menjawab permasalahan.



### **1.7.9. Kualitas Data**

Kualitas data ialah upaya untuk menjamin validitas dan realibilitas data. Dalam tubuh penelitian kualitatif pada dasarnya telah ada upaya untuk menjaga derajat kepercayaan data yang dinamakan keabsahan data. Maksud keabsahan data, yaitu tiap kondisi perlu mendemonstrasikan nilai yang tepat, memfasilitasi dasar supaya bisa diimplementasikan, dan mempersilakan keputusan luar yang bisa dirancang secara stabil dari ketentuan pada temuan maupun keputusannya (dalam Moeleong, 2007).

Dalam kajian ini untuk mencari keabsahan data dilakukan dengan teknik traingulasi data. Moeleong (2007) menyebut triangulasi ialah metode untuk memeriksa validitas data yang mempergunakan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut, guna mengecek atau membandingkan data tersebut; ada beberapa hal yang dapat dicapai, yaitu:

1. Perbandingan terhadap data hasil observasi dengan hasil wawancara.
2. Perbandingan terhadap kondisi dan sudut pandang seseorang dengan bermacam asumsi maupun perspektif orang lain. Perbandingan hasil wawancara dengan substansi suatu dokumen yang saling berhubun



